

Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 2

ISSN: 2442-3777 (cetak)

Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

ISSN: 2622-691X (online)

Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

FENOMENA GELANDANGAN PENGEMIS SEBAGAI DAMPAK DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN URBAN DAN RURAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hendy Setiawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia

Email: hendysetiawan357@mail.com

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan di kawasan urban menjadi daya pikat bagi kaum di luar urban untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan urban sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi urbanisasi secara masif dari area rural ke area urban tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan urban menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan lebih dari 70% gelandangan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya trend Yogyakarta sebagai kota yang pesat pembangunannya, juga dari sisi ekonomi menjadi pusatnya. Oleh karena itu, dengan modal pembangunan ekonomi yang besar menjadi alasan gelandangan pengemis untuk mendapatkan keuntungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: *Gelandangan Pengemis, Kawasan Urban, Pembangunan Kota*

PENDAHULUAN

Wilayah yang memiliki keurbanan yang pekat dapat dipahami sebagai tempat pembangunan ekonomi yang ideal. Dampaknya adalah wilayah urban menjadi arena yang memiliki kemampuan untuk memikat kaum pada kawasan rural untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak dan mengadu keberuntungan tanpa memikirkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan yang ada pada dirinya (Ekawati, 2014). Tingkat urbanisasi pada substansinya menjadi

sebuah alur dinamis yang lazim yang umum di dalam upaya memperbaiki level kesejahteraan ekonomi masyarakat penduduk. Dinamika proses urbanisasi yang terjadi dengan masif dan pesat di Indonesia semestinya perlu pahami secara holistik dan komprehensif. Banyak penelitian yang telah menunjukkan ketika pemusatan penduduk dalam kawasan urban yang dikatakan besar di Indonesia telah menunjukkan peningkatan dengan

sangat laju (harahap, 2013).

Penelitian yang pernah diadakan oleh Warner Ruts di kurun waktu tahun 1987 (dalam Mambang, 2016) memperlihatkan bahwa jumlah mini urban atau kota-kota berukuran kecil (<100 ribu jumlah penduduk) sangat besar jika dikomparasikan terhadap kota berukuran menengah (500 ribu sampai 1 juta jiwa). Realita ini berimplikasi pada terjadinya sebuah proses migrasinya penduduk dalam wilayah rural menuju pada kawasan yang keurbananya sangat tinggi yang memicu tidak dapat dikonter secara terstruktur dan holistik di dalam manajemen wilayah perkotaan. Ada kawasan urban/kota yang berukuran signifikan (urban) akan terus mengalami kelajuan tingkat keurbananya, dan selanjutnya kawasan tersebut akan terus berulang dan berlanjut akan peningkatan level kawasan tersebut yang pada akhirnya terjadilah kawasan urban yang berlebihan dan inilah yang menjadi pemicu berbagai komponen masyarakat di luar kawasan tersebut mulai dari economic society, masyarakat desa sehingga dengan kata lain terjadi sebuah gelombang perpindahan kehidupan dari rural area ke urban area secara terus menerus. Tanpa memperhitungkan jumlah dan kapasitas kota tersebut, banyak masyarakat tanpa berpikir rasional datang dari luar area ke kota tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan yang dimilikinya dengan dasar memperbaiki kualitas kesejahteraan hidupnya di kota.

Anggapan bahwa kota sebagai kawasan yang mudah mendapatkan pekerjaan, dan banyak keberuntunganlah yang menyebabkan terjadi persoalan yang serius di perkotaan. Akibatnya, keadaan tata kelola kota tidak terkontrol dan justru menimbulkan persoalan kompleks di kawasan urban (Saputra dan Rahayu, 2015).

Sebuah proses urbanisasi tersebut, dapat dilihat kawasan yang telah mengalami kondisi ini dapat diamati pada kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah sebuah kawasan tujuan urbanisasi yang menyandang multi citra sehingga dengan citranya mampu menarik masyarakat di luar urban datang ke kota ini. Tidak terkendalinya penduduk urban di perkotaan ini sering kali memunculkan permasalahan sosial yang tidak bisa dihindari. Kasus pada Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah kompleks jika dilihat dalam perspektif ilmu perkotaan. Akan tetapi, dari banyaknya persoalan yang ada dapat dilihat bahwa permasalahan sosial di kota mendominasi karena muncul akibat dari pembangunan kawasan perkotaan dan level urbanisasi yang keablasan ialah munculnya fenomena gelandangan dan pengemis. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang dikenal sebagai daerah istimewa yang ramah dan nyaman, serta memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang.

Sebagai kawasan sentral pendidikan dan kultural, menjadikan Yogyakarta tiap tahunnya tidak akan pernah sepi akan pendatang baru, baik

pada mereka yang datang untuk menempuh pendidikannya di kota ini maupun mereka yang menghabiskan waktu liburannya pada kawasan ini. Banyak juga pendatang dari berbagai luar wilayah yang mencoba mencari untung dengan menentukan naib hidupnya di Yogyakarta. Hal tersebut membuat Yogyakarta semakin hari semakin padat dan terlihat semrawut. Merespon laju pertumbuhan kota dan tren urbanisasi yang kebablasan tersebut, maka salah satu persoalan kompleks yang muncul yakni adanya gelandangan pengemis sebagai bentuk resiko dari pertumbuhan kota. Pada dasarnya gelandangan dan pengemis yang muncul pada wilayah urban akan selalu mencaai celah yang ada dengan mencari sentrak keramaian dan juga kawasan wisata untuk dapat melakukan aksinya mereka. Artinya di mana ada kawasan ramai dalam perkoataan maka tidak akan luput dari eksistensi gelandangan pengemis. Berbagai riset sejarah mengemukakan jika lahirnya masalah gelandangan pengemis pada mayoritas kota kota besar pada belahan dunia sudah mengalami titik temu di mana lahirnya gelandangan pengemis akan selalu berjalan berbarengan dengan gelombang gerakan industrialisasi, globalisasi, modernisasi, dan pembangunan. Dampak Industrialisasi di berbagai kota besar yang ada di dunia dan menengah di Indonesia telah mengubah kehidupan masyarakat di mana terjadi peningkatan peristiwa migrasi dari kawasan rral menuju area urban.

Peristiwa terjadinya migrasi yang terjadi dilihat dari perspektif ilmu tata kelola kota disamping sebagai implikasi dari adanya modernisasi dan pertumbuhan kota, ternyata juga didukung oleh menyempitnya ruang ruang kehidupan pada kawasan rural dan juga sebagai parameter yang mengindikasikan bahwa terjadi persoalan serius di wilayah urban seperti sulitnya mengakses lapangan pekerjaan, perputaran atau sirkulasi ekonomi yang sangat sulit, dan juga maraknya pengangguran di desa yng memicu keterpurukan kehidupan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu terjadi ketidak seimbangan pemerintah dalam menagani kawasan rural dan urban sehingga pemerintah hanya melihat masa depan kota dengan mementingkan unit unit produksi perkotaan, peningkatan fasilitas pelayanan publik, perbaikan sarana dan infrastruktur yang memadai sehingga kawasan desa menjadi tertinggal jika dikomparasikan oleh keadaan kota dan akhirnya terjadi pelenturan aksi yakni munculnya migrasi yang tidak bisa terbendung oleh siapapun.

Munculnya kelas dari fenomena gepeng di Yogyakarta akan sangat sempit jika hanya gali dan telaah serta dianalisis sebagai implikasi daripada pembangunan, modernisasi maupun akibat industrialisasi. Proses transformasi sosial yang terjadi pada komunitas gepeng bukan hanya disebabkan dan berdampak pada sisi kebijakan, ekonomi, politik saja

melainkan demikian juga pada aspek keyakinan dalam pengetahuan, keaneragaman dan bangunan *world view* masyarakat (Irwan Abdullah, dalam Ahmad 2010). Hal yang demikian, bisa dipahami bahwa gejala gepeng memiliki keeratan relevansi dengan problematika-problematika yang lain, baik secara keadaan ekstern maupun dalam keadaan intern, seperti sektor ekonomi, aspek psikologi, sosial, budaya, lingkungan, dan pendidikan (Supriyadi, dalam Ahmad 2010).

Gepeng dilihat dari sudut pandang teori struktur-fungsionalis dapat dinarasikan, bahwa kelas gepeng sebagai bagian dari komunitas kelas pinggiran atau marginal (dilihat aspek ekonomi) di dalam tataran status struktur keadaan sosial masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk mengaktualisasikan keberadaan komunitasnya dengan cara melakoni dan menjalani secara berkelanjutan terhadap dunia yang informal sebagai bagian dari ketahanan terhadap sektor atau ruang pembangunan yang cenderung mengarah berpihak pada sebuah sektor formal. Artinya bahwa pada kawasan perkotaan keberadaan economic society akan menentukan wajah kota dan karena keberadaan kelompok economic society ini memiliki peran besar maka perhatian pemerintah terhadap sektor inipun juga semakin besar. Oleh karenanya keberadaan sektor informal cenderung dianggap tidak ada dalam kontribusinya pembangunan kota.

Fenomena gelandangan yang mengaktualisasikan sebagai ungkapan protes terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi keadilan ekonomi secara merata terhadap pengusaha atau pemilik modal dan kaum intelektual dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai serta mengutamakan pada sektor formal.

Gepeng secara substansi dapat diilhami sebagai perwujudan dari entitas kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi keadaan ekonomi atau dalam ilmu ekonomi berada dalam kondisi sub marginal. Keadaan gepeng secara nyata tidak mempunyai kapasitas yang baik khususnya dalam bersaing terhadap kelompok formal yang diimplikasikan oleh kualitas kemampuannya yang terbatas, level pendidikannya yang tidak mencukupi, dan kapasitasnya yang kurang begitu menggembirakan. Sebab itu, kelompok masyarakat ini biasanya masuk ke dalam sebuah sektor informal. Mereka melakukan segala tindakan atau aktivitas bekerja tidak menentu atau bekerja seadanya tanpa memilah dan memilih, mengerjakan segala sesuatu apa yang bisa dikerjakan, pada sektor yang tidak memerlukan ilmu keterampilan pengetahuan, kemampuan yang ada, modal ekonomi atau finansial yang mendukungnya, termasuk mengemis atau meminta-minta. Pada dasarnya semua itu rela dilakukan semata mata untuk mempertahankan keidupannya di tengah tengah kelap kelip kehidupan kota yang mendesak mereka agar

mampu bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan setiap harinya. Oleh karena sangat tidak bisa disangkal oleh siapapun jika di kawasan kota-kota besar di misalnya di Indonesia masih dilingkupi dan tidak menjauh dari problematika kompleks sosial yakni gelandangan pengemis, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan pengemis dan gelandangan di Yogyakarta sendiri menurut Dinas Sosial mengemukakan bahwa nyaris 70% lebih gepeng yang ada di kawasan DIY berasal dari luar D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Yogyakarta cukup kewalahan melakukan penindakan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bappeda D.I.Yogyakarta jumlah entitas masyarakat gepeng yang ada pada kawasan Yogyakarta mencapai 321 orang pada tahun 2016, dan di tahun 2017 mencapai 406 orang, serta di tahun 2019 mencapai 324 orang. Sementara itu data Gepeng menurut data provinsi Dinas Sosial D.I.Yogyakarta dapat dipahami pada tabel di bawah ini.

Tabel .1 Rekapitulasi Keberadaan Gepeng di D.I. Yogyakarta Tahun 2016 2020

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2016	171	150
2	2017	236	170
3	2018	190	134
4	2019	197	147
5	2020	197*	147*

Sumber: Dinsos D.I.Yogyakarta, 2020

Tingginya jumlah gelandang pengemis tersebut diakibatkan oleh status

Yogyakarta yang semakin hari berubah menjadi kawasan yang semakin urban. Berikut ilustrasi gambar keadaan gepeng saat ditertibkan oleh Satpol PP Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 1. Penertiban Gepeng di Malioboro



Sumber: Dinas Sosial Jogjapro.v.go.id

Berdasarkan realita keadaan di atas maka peneliti ingin berfokus pada Fenomena Gelandangan-Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap masalah disparitas pembangunan anatar kawasan kota dan non kota). Alur tulisan ini pangkal dari tingginya kelajuan urban dari Yogyakarta yang begitu pesat, misalnya seperti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan derajat urbanisasi dan pembangunan yang berlebihan.

KAJIAN PUSTAKA

Mengacu dari hasil riset yang diutarakan oleh Isma Riskawati dan Abdul Syani (2012) menghasilkan bahwa dalam risetnya yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota

Bandar Lampung)", hasilnya memperlihatkan bahwa ada dua faktor dominan penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis, yaitu meliputi faktor dari dalam pelaku (intern) seperti (kemelaratan, sanak famili, tingkat usia, memiliki kecacatan secara fisik, sangat minimnya tingkat pendidikan dan kemahiran, sikap dan mental) dan faktor dari luar pelaku (eksternal) yang meliputi pengaruh keadaan lingkungan sekitar dan letak geografis wilayah yang didiaminya)

Selain itu merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pospos (2017) di Kota Langsa menjelaskan bahwa setidaknya ada dua faktor yang mendominasi pada keadaan seseorang menjadi gelandangan pengemis. Faktor tersebut, meliputi faktor struktural dan faktor budaya. *Factor structural (sistematis)* yang menjadi implikasi terhadap masyarakat menjadi pengemis gelandangan adalah: 1) Pendidikan para gelandangan pengemis yang sebagian mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar bahkan tidak lulus sekolah dasar, hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keahlian formal sehingga tidak dapat diterima bekerja di perusahaan manapun. 2) Bantuan pemerintah tidak maksimal, sehingga mereka terus terjebak dalam kemiskinan dan lebih memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kehidupannya. *Factor cultural* yang menjadikan mereka menjadi memilih menekuni gelandangan pengemis adalah: 1) Pasrah tanpa berusaha, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya

modal ekonomi yang diperoleh dari negara atau pemerintah sehingga mereka hidup dalam lingkaran kemiskinan, 2) Tidak memiliki visi dan misi hidup, sehingga tidak ada niat dari pengemis untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tujuannya untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan mendalam terkait eksistensi Gelandangan-Pengemis sebagai dampak disparitas pembangunan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode ini maka peneliti akan lebih mudah untuk melihat. Metode penelitian yang digunakan antara lain:

Metode wawancara dilakukan guna menyelami dan mendapatkan informasi dari sumber primer, misalnya dari narasumber yang terlibat secara langsung. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana faktor yang menyertai gelandangan pengemis di Yogyakarta maka peneliti melakukan wawancara terhadap lima responden gelandangan pengemis yang ada di Yogyakarta untuk menggali informasi lebih mendalam untuk dapat dianalisis. Informasi hasil wawancara yang didapatkan dari sumber primer kemudian dikategorisasikan dan dianalisis guna memunculkan temuan-temuan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan sebuah informasi yang akurat terkait dengan eksistensi Gelandangan-Pengemis sebagai dampak disparitas pembangunan perkotaan, serta apa kelebihan Yogyakarta jika dikomparasikan dengan daerah lainnya. Data yang ingin diperoleh dalam wawancara ini adalah untuk menemukan realita informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya dan relevan tentang bagaimana sumbangsih dari konsep urbanisasi dan pembangunan perkotaan terhadap permasalahan sosial di perkotaan "Gelandangan-Pengemis".

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan cara dengan pengumpulan sumber data sekunder dengan melakukan pencarian informasi melalui jurnal, literatur, buku, dan berita. Melalui metode data sekunder maka akan memperkuat dan mendukung peneliti untuk menganalisis terhadap eksistensi Gelandangan-Pengemis sebagai dampak disparitas pembangunan perkotaan. Saat wawancara peneliti secara langsung tanpa perantara mewawancarai dengan menggunakan lima responden gelandangan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan tentunya pertanyaan tersebut sangat relevan dengan judul penelitian yang di angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya mencuatnya gelandangan dan pengemis banyak dipengaruhi oleh banyak faktor mulai

dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor struktural. Oleh karena itu pada diskusi dan analisis ini peneliti akan menganalisis satu per satu akan lebih jelas.

Mengemis Sebagai Transformasi Nilai-Nilai Menjadi Mental-Mental Pengemis

Berdasarkan wawancara terhadap responden pertama dengan gepeng bernama Sarinem yang usia 67 tahun dan tinggal di Srandakan Bantul (asli kebumen) mengatakan bahwa Sarinem sudah menekuni profesi sebagai pengemis selama kurang lebih empat tahun. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dari responden pertama ini ada temuan yang sangat menarik untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Rutinitas dan aktivitasnya pada kehidupannya sehari-hari Sarinem bekerja sebagai serabutan apapun dilakoni seperti melayani jasa dengan memijat seseorang, dan mengobati orang-orang yang punggungnya sakit encok dengan penghasilan tidak tetap dan itupun kadang-kadang pula. artinya pendapatan yang diperoleh kadang cukup dan kadang tidak mencukupi kehidupannya. Biasanya orang yang datang menggunakan jasa pijatnya memberikan imbalan kepadanya dengan hanya memberikan uang yang bervariasi yakni kisaran Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 tergantung pengguna jasanya. Sarinem menyadari bahwa dengan mengemis akan dapat membuat keadaan hidupnya menjadi jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum menggepeng. Keadaan

ekonomi Sarinem yang serba kekurangan dan terdesak yang dialami sekarang ini, menjadi hambatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya lebih-lebih ditambah dengan keadaan rumah yang hampir rubuh.

Di samping itu, Sarinem juga menyadari dengan mengandalkan bantuan pemerintah juga tidak mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan alasan ekonomi dan keadaan yang serba kekurangan itu, maka Sarinem memilih untuk pergi ke pusat Yogyakarta dengan mencari harapan yang lebih baik, yaitu dengan menjual belas kasih empati kepada sasaran keramaian orang-orang yang memiliki empati kepadanya. Sarinem setiap empat hari sekali baru akan bisa pulang kerumahnya yang berada di Srandakan Bantul sehingga dengan kata lain selama empat hari menjalani profesi mengemis Sarinem tidur dilorong-lorong sekitaran kawasan Malioboro yang tidak menentu (tidur menggelandang dengan alas kardus).

Melihat hasil wawancara terhadap responden pertama tersebut, pada dasarnya ketidakberdayaan ekonomi seseorang mampu mengubah pola pikir rasionalnya dan mampu mentransformasi nilai-nilai seseorang untuk mewujudkan jalan pintas asalkan tidak merugikan orang lain. Mental-mental untuk menjadi pengemis nampaknya sangat erat relevansinya dengan desakan dan benturan ekonomi sosial yang dialaminya. Hal ini dilakukantidak lain dan tidak bukan

semata mata untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyambung hidup dengan pekerjaan yang halal. Oleh karena itu, temuan ini memeperkuat penelitian yang dilakukan oleh Pospos (2017) di Kota Langsa menunjukkan bahwa ada dua faktor yang mendominasi yang menjadi seseorang menjadi gelandangan pengemis. Faktor tersebut, meliputi faktor structural yang sistematis dan faktor budaya atau kultural yang melingkupinya.

Dalam konsep perkembangan an tingkat kelajuan sebuah kota, sebenarnya wajah pada sebuah kota itu ditentukan oleh sektor economic society. Artinya bahwa orang-orang yang memiliki banyak uang atau pengusaha berusaha untuk menciptakan sentral-sentral bisnis di perkotaan sehingga mereka yang tidak memiliki kemampuan dan kapasitas secara cepat akan terpinggirkan. Hal ini sebetulnya sangat kontras, padahal dengan pembangunan kota yang pesat seharusnya mampu menjadikan ruang yang luas dalam berkesempatan kerja pada pengangguran pada sekelilingnya untuk dapat bekerja. Akan tetapi justru masyarakat pengusaha tidak memikirkan kondisi masyarakat yang lemah secara ekonomi dan sosial, dan yang menjadi orientasi adalah untung dan untung.

Mengemis Sebagai Ekspresi Gerakan Protes Kepada Pemerintah

Pada wawancara yang kedua dengan responden yang bernama Bapak Hadi Mulsodo yang bertempat

tinggal di Jalan Mataram Yogyakarta menyatakan bahwa beliau telah menekuni profesi sebagai gepeng di Yogyakarta selama kurang lebih 40 tahun dengan penghasilan yang didapatkannya dari profesinya sebagai pengemis rata-rata berkisar sampai Rp.500.000 per dua hari. Dengan penghasilan profesinya sebagai gepeng itu telah diketahui alasan penyebabnya di mana responden ini merasakan tanpa bekerja keras atau hanya bekerja per dua hari saja sudah mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah. Artinya bahwa responden ini menginginkan pekerjaan yang mampu menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja dan bersusah payah seperti pada orang lain pada umumnya. Bertransformasi menjadi gepeng adalah sesuatu anugerah dari sang pencipta dunia supaya mendapatkan kenikmatan hidup yang signifikan tanpa melalui proses kerja keras pada umumnya, padahal dalam sisi yang berbeda pemerintah sudah memberikan sebuah regulasi yang cukup jelas yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak memberikan uang kepada gepeng. Walaupun kenyataannya berprofesi sebagai pengemis, kelihatannya pada saat diwawancarai Bapak Hadi Mulsodo tidak menyangkal bahwa dirinya berprofesi sebagai gepeng, namun kenyataannya dirinya menggepeng di kawasan malioboro D.I. Yogyakarta. Bapak Hadi Mulsodo

mengaku kepada peneliti bahwa itu merupakan salah satu bentuk keamanan pada wilayah kekuasaannya yang melewati daerahnya. Ketika ditanya mendalam berkaitan dengan apayang diharapkan kepada pemerintah bagi dirinya untuk kedepannya, Bapak Hadi Mulsodo justru mengekspresikan bahwa dirinya sangat kecewa mendalam terhadap pemerintah dan tidak percaya lagi akan peran fungsi pemerintah sebagai institusi yang menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya. Selain hal tersebut, juga dikarenakan pemerintah tidak mampu menuntaskan persoalan ekonomidan kebutuhannya yang serba kekurangan, sehingga Bapak Hadi Mulsodo menekuni profesinya ini selama 40 tahun. Jika di amati lebih mendalam ternyata ada transformasi nilai-nilai dalam kemasyarakatan terhadap responden kedua ini, tim riset menginterpretasikan bahwa responden ini ingin menunjukkan kepada pemerintah jika profesinya yang ia lakoni selama ini sebagai gerakan protes kepada pemerintah yang dinilai gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan bahwa responden ini sungguh tidak peduli dan percaya lagi kepada keberadaan pemerintah. Artinya, seharusnya pemerintah mampu memberikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya tanpa ada kesenjangan dalam sosial. Responden ini beranggapan bahwa justru pemerintah

memiliki kecenderungan keberpihakan terhadap masyarakat kelas atas atau masyarakat ekonomi dibanding dengan masyarakat yang berada pada ekonomi pinggiran.

Banyaknya pendatang dari luar menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan simpati kepada gelandangan pengemis dengan memberikan uang. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberitahukan kepada orang yang ingin memberikan uang kepada gepeng bahwa dilarang memberi sesuai dengan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh kontras di dalam citra kawasan Yogyakarta sebagai daerah yang berstatus istimewa di Indonesia masih menjadi sumber sarang bagi gelandangan dan pengemis, bahkan setiap tahunnya eksistensi jumlah gepeng bertambah semakin bertambah dan ini akan meresahkan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Seharusnya dengan predikat citra Istimewa mampu memberikan pelayanan kesejahteraan untuk masyarakatnya sesuai dengan penataan tata kelola perkotatan yang berkelanjutan tanpa kemiskinan dan keterpurukan ekonomi.

Pensiun Dini PNS di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Pontianak Merantau ke Yogyakarta Menjadi Pengemis

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang diperoleh dari responden ketiga, peneliti mendapatkan informasi yang cukup mendalam dari

temuan lapangan. Ibu Adeh berusia 68 tahun dan merantau ke Yogyakarta pada 31 oktober 1999. Perempuan renta asal Pontianak, Kalimantan Barat ini merantau ke Yogyakarta untuk mendapatkan rezeki dan penghasilan yang jauh lebih baik. Sebelumnya, Ibu Adeh merupakan seseorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Kalimantan Barat. Ibu Adeh mengajukan pensiun dini dari Pegawai negeri Sipil dikarenakan pada saat itu penghasilan yang dia dapatkan sangat minim sekali. Merespon hal tersebut, maka Ibu Adeh merasa lelah dengan keadaan tersebut dan merantau ke Yogyakarta. Saat merantau ke Yogyakarta ketika datang pertama kalinya ke Yogyakarta bekerja sebagai penjaja air mineral kemasan di jalanan Yogyakarta. Usia yang sudah menua dan renta sudah tidak mendukung fisiknya untuk melakukan tindakan berjualan air mineral mengitari jalanan dan diperburuk saat ini Ibu Adeh tempat tinggalnya di Yogyakarta belum jelas. Oleh karena itu, Ibu Adeh untuk memenuhi kehidupannya kesehariannya di Yogyakarta dengan mengandalkan uang pensiun dan juga sembari mengemis.

Berdasarkan temuan hasil wawancara tersebut, sebetulnya ada faktor yang signifikan terjadi dalam individu tersebut, sehingga harapan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya artinya pindah dari daerah satu ke daerah lainnya. Adanya faktor struktural tersebut nampaknya

memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Keadaan ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan seseorang, nampaknya justru mampu mentransformasi nilai-nilai yang justru memperkuat mental-mental menjadi pengemis. Selain itu, tidak ada tujuan yang jelas dalam proses urbanisasi juga mendukung seseorang untuk mampu menciptakan hal informal asalkan dapat menyambung hidupnya. Menurut peneliti, dalam kasus Ibu Adeh, sebetulnya jika pemerintah memberikan upah atau gaji yang layak bagi Ibu Adeh semasa menjadi Pegawai negeri Sipil di Kota Pontianak maka situasi ini tidak akan terjadi. Hal ini terjadi karena memang pendapatan yang didapatkan saat itu sangatlah kecil, bahkan Ibu Adeh menyebut bahwa pendapatan guru pada saat itu sangat miskin (kere), dibandingkan dengan menjadi guru saat ini dengan hanya menunggu tanggal upah cair. Dalam pembangunan perkotaan ada beberapa aspek yang sangat penting untuk disediakan dalam konsep kota yang memang menjadi tempat hidup yang layak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebuah kota itu mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara prima sehingga pemerintah kota memang membuat sebuah kebijakan strategis dan mampu meningkatkan taraf hidup warga kota.

Dapat di pahami bahwa ketika pembangunan kota tidak mampu memberikan pelayanan kepada

masyarakatnya secara maksimal tanpa diskriminatif, maka justru akan menimbulkan problem-problem yang begitu ruwet dan rumit, misalnya seperti yang dilakukan oleh responden tiga ini yaitu dengan merantau atau urbanisasi dari Kota Pontianak ke Yogyakarta tanpa orientasi yang jelas. Oleh karena itu sangat perlu dan penting di dalam perencanaan kota juga mempertimbangkan aspek-aspek ketika sebuah kota itu dibangun. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota tidak memungkinkan secara murni dibangun sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya wajah sebuah kota yang paling cenderung memiliki porsi banyak adalah economic society bukan pemerintah kota. Hal ini berjalan secara alamiah bahwa memang sebetulnya sentral-sentral perdagangan dan bisnis ditentukan oleh orang yang memiliki banyak uang dan yang lemah secara finansial akan terperosok ke dalam pekerjaan informal.

Mengemis Merupakan Pekerjaan Yang Hanya Butuh Modal Keberanian dan Tidak Perlu Proses Panjang

Kebanyakan gepeng yang berada di Yogyakarta adalah pendatang. Banyak orang berurbanisasi dari kawasan perdesaaan ke kota berharap untuk mendapat pekerjaan tetap, akan tetapi karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan sebagai modal yang dibutuhkan untuk berkerja sebagian orang yang berurbanisasi memilih menjadi gelandangan dan pengemis di

kota. Seperti Bapak Sucipto (65) ia berurbanisasi dari Purworejo ke Yogyakarta sejak tahun 1985 terhitung sudah 33 tahun menetap di Yogyakarta sebagai gelandangan. Bukan waktu yang sebentar untuk menjalani profesi ini, selama ini untuk menyambung hidupnya sehari-hari Bapak Sucipto mencari barang bekas seperti kardus dan botol plastik di jalan-jalan yang ia lalui untuk kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Hasilnya dari mengumpulkan barang bekas ini bapak sucipto setiap harinya dapat mengumpulkan penghasilan bersih sekitar 20 ribu yang digunakan membeli makan dan walaupun begitu, apabila musim hujan tiba maka pendapatan Bapak Sucipto akan berkurang.

Alasan Bapak Sucipto menjadi gelandangan adalah kurangnya keterampilan dan kurangnya pendidikan beliau. Sehingga akhirnya memilih menjadi gelandangan dan mengumpulkan barang bekas, beliau bilang pekerjaan ini tidak perlu melamar hanya asal bisa saja. Hal ini memperkuat temuan riset yang dilakukan oleh Isma Riskawati dan Abdul Syani (2012) yang menghasilkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis, yaitu faktor dari internal (kemelaratan, keadaan keluarga, usia, kecacatan tubuh, minimnya tingkat pendidikan dan keterampilan, sikap dan mental). Selama 33 tahun menekuni pekerjaan ini ia pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial yaitu sepeda

yang sampai sekarang menjadi harta satu satunya miliknya dan masih ia gunakan untuk berkeliling sekitar Yogyakarta mencari barang bekas untuk dijual kembali ke pengepul sekaligus sarana penunjang untuk mengemis. Ia mulai mengayuh sepedanya sejak pagi sebelum terbit matahari hingga mengakhiri saat matahari sudah hampir tenggelam. Biasanya ditengah-tengah ia mencari barang-barang bekas ia akan beristirahat saat siang untuk sekedar makan dan minum kemudian pada malam hari akan ia gunakan untuk beristirahat karena kondisinya yang sudah mulai lemah.

Demikian juga dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota besar bagi orang-orang dengan kemampuan dan pendidikan yang minim menjadi penyebab banyak pelaku urbanisasi yang akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis untuk menyambung hidup daripada harus kembali ke desa asal. Seiring kemampuan teknologi dan perkembangan zaman banyak lahan pertanian diubah menjadi gedung-gedung perkantoran, mall atau pabrik-pabrik yang lebih banyak menggunakan mesin ketimbang tenaga manusia membuat banyaknya pengangguran yang memilih menjadi gepeng demi memenuhi kebutuhan harian mereka. Oleh karena itu sangatlah wajar jika banyak orang-orang yang berduyun-duyun ke sebuah kota tanpa memiliki modal yang cukup, keterampilan, pendidikan, dan

kemampuan justru akan menambah problematika di perkotaan atau wilayah urban.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan dan analisis lapangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa gelandangan dan pengemis yang ada di Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta. Hal ini ditegaskan oleh Dinas Sosial Yogyakarta 2017 bahwa 70% gelandang pengemis yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari luar Yogyakarta. Temuan Dinas Sosial tersebut diperkuat dengan hasil penelitian tim kami dilapangan bahwa dari lima responden yang berhasil diwawancarai, ternyata empat dari responden yang diwawancarai berasal dari luar Yogyakarta. Misalnya responden pertama asli dari Kebumen, responden ketiga berasal dari Kota Pontianak, responden keempat berasal dari Karang Anyar, dan responden kelima berasal dari Kabupaten Purworejo. Mereka merupakan kaum urban yang datang dari berbagai daerah dan menekuni profesinya di Yogyakarta. Adanya tingkat urbanisasi inilah yang menjadi problem kita bersama. Melihat temuan dan kajian diskusi kelompok kami, maka tim penelitian kami menyimpulkan bahwa akar permasalahan tersebut terjadi dikarenakan gap atau disparitas. Sepanjang gap antara pembangunan perkotaan dan perdesaan ini masih ada dan kemungkinan akan terjadi secara kontinu maka akan menimbulkan

tingkat urbanisasi yang tinggi. Urbanisasi yang begitu deras melahirkan problematika yang sangat kompleks dan holistik diberbagai sektor kehidupan. Individu-individu yang tidak mampu beradaptasi di sebuah kota mereka akan lambat laun bertransformasi ke dalam pekerjaan informal.

Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa pada intinya aktivitas untuk menggelandang dan mengemis juga merupakan sebuah cara mereka yang dapat dilakukannya dan itupun pilihan satu satunya untuk mengekspresikan dan menjawab persoalan yang ada. Ada temuan menarik bahwa mereka menggepeng karena sebagai gerakan protes komunitas gepeng kepada pemerintah yang mana responden kedua ini menganggap bahwa pemerintah yang tidak terampil dan lihai dalam mengurus masyarakat ekonomi ke bawah. Di samping itu, mengemis dan menggelandang juga sebagai jawaban karena keterbatasan ruang gerak ekonomi, sehingga dengan melakoni profesi informal tersebut dengan menciptakan dan menjadikan sikap mental-mental menjadi pengemis nampaknya pilihan terakhir yang dipilih untuk dapat menyambung hidup. Oleh karena itu dapat ditekankan bahwa selagi masih ada disparitas dalam pembangunan rural area dan urban area maka permasalahan tersebut menjadi sebuah siklus yang terus berputar dan berkorelasi dan satu-satunya cara untuk menghulangkan problematika

kompleks tersebut adalah dengan memutus atau menghilangkan gap atau disparitas yang terjadi di urban dan rural area.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, F. P. (2010). Tren urbanisasi di Indonesia.

Ahmad, M. (2012). *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Penelitian, 7(2).

Ekawati, N. N. (2014). *Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 129-133.

Fadli, L. (2008). *Keterkaitan antara Kemiskinan Perkotaan dengan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)

Harahap, R., & Sos, S. (2013). *Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia*. Jurnal Society UBB, 1(1).

Haryono, T. J. S. (1999). *Dampak Urbanisasi Terhadap Masyarakat di Daerah Asal*.

Masyarakat, Kebud. dan Polo, 12(4), 67-78.

Iqbali, S. (2006). *Studi Kasus Gelandangan–Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*. Piramida.

Mambang, M., & Harry, W. F. (2016). *Implementasi kebijakan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susial Dan Anak Jalanan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*. Pencerah Publik, 3(2), 1-8.

Piramida. Muslim, M. (2013). *Penanggulangan Pengemis dan gelandangan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal El-Riyazah, 4(1), 24-35.

Pospos, A. F. F. (2017). *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa*. Jurnal Investasi Islam, 2(2), 97-112.

Pratama, Y. S. (2017). *Perancangan Interior Tempat Edukasi Gelandangan dan Pengemis di Surabaya*. Intra, 5(2), 313-321.

Riskawati Isma, Abdul Syani. (2012). *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota*

Bandar Lampung), **Jurnal Sociologie**, Vol. 1, No. 1: 43-5

Saputra, H., & Rahayu, S. (2015). *Hubungan Tingkat Urbanisasi Dan Tingkat Ketimpangan Wilayah Di Daerah Pantura Jawa Tengah*. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 737-752.

Saputro, A. (2011). *Pengaruh persepsi tentang gepeng (gelandang dan pengemis) terhadap pengambilan keputusan memberi uang kepada gepeng*.

Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). *Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*. *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1).

Yatim, Y., & Juliardi, B. (2016). *Studi Gender Jaringan Sosial Pengemis Anak Perempuan Di Kota Bukittinggi*. *Kafaah Journal of Gender Studies*, 6(2), 201-214.